

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

624 Penerima KJMU Tak Sesuai Syarat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan 624 penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tidak sesuai dengan syarat. Temuan ini merupakan bagian dari pemadanan data kesejahteraan sosial agar penerima KJMU tepat sasaran.

Pemadanan data sempat dikeluhkan karena nama sebagian mahasiswa dari keluarga miskin keluar dari KJMU. Pemprov DKI Jakarta memadankan data dari tiga parameter, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, hasil penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili, serta pekerjaan kepala keluarga penerima KJMU. Hasilnya, ditemukan 624 penerima tidak sesuai dengan syarat dari 19.041 penerima KJMU tahun 2023.

Rinciannya, 14 orang tidak sesuai data SIAK Terpusat; 577 orang perlu diverifikasi data kependudukan sesuai domisili karena pindah ke luar daerah (329 orang); tidak dikenal (125 orang); dikenal, tetapi tidak diketahui keberadaannya (119

orang); dan tidak ada RT (4 orang). Sementara 33 orang lainnya dari keluarga dosen, karyawan BUMN/BUMD, PNS, konsultan, ataupun anggota lembaga tinggi lainnya.

"Sebanyak 624 orang ini menjadi prioritas yang akan disurvei lapangan terlebih dahulu," ujar Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi, Selasa (12/3/2024).

Survei lapangan untuk memastikan kelayakan mereka sebagai penerima KJMU. Sebab, penerima KJMU harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori layak yang ditetapkan pada Februari dan November 2022 serta Januari dan Desember 2023 dengan data registrasi sosial ekonomi.

Data ini selanjutnya dipadankan dengan data kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta serta data Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta terkait kepemilikan kendaraan roda empat dan aset ber-

upa tanah atau bangunan senilai lebih dari Rp 1 miliar.

Lanjut belajar

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah bertemu sejumlah mahasiswa penerima KJMU setelah muncul keluhan seiring pemadanan data. Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (7/3) itu dipastikan KJMU berlanjut dengan pemadanan data agar tepat sasaran.

Seusai bertemu sejumlah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Islam Negeri Purwokerto di Balai Kota Jakarta, Heru menyampaikan, penerima KJMU tetap mendapatkan bantuan sampai

selesai kuliah. "Tentu, tetap ada pemadanan data. Salah satunya, Badan Pendapatan Daerah akan mengecek data pajak dari setiap orangtua mahasiswa dan data lainnya. Jadi, mahasiswa tetap lanjut belajar, kami yang akan memadankan datanya," kata Heru.

Bantuan bagi penerima KJMU yang tidak layak akan dialihkan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran KJMU tepat sasaran membantu mahasiswa dari keluarga tak mampu menempuh pendidikan tinggi. "Kalau memang mampu, anggarannya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu," ujar Heru. (DAN)